



MENANTI MBG AMAN, KAPAN?

566 Korban di Sidoarjo, Dugaan Keracunan Juga Terjadi di Nganjuk hingga Agam

Kapan MBG benar-benar aman dikonsumsi? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah ratusan anak di sejumlah daerah mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbaru, di Sidoarjo, Jawa Timur, jumlah korban mencapai 566 pelajar dan santri pada Rabu (2/9/2026), dengan 88 orang masih menjalani perawatan. Pada hari yang sama, 49 siswa SMAN 3 Nganjuk dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu makanan gratis ini. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 334 siswa dan guru di Kecamatan Palupuah juga mengalami nasib serupa. Persoalan keamanan pangan MBG bukan kali pertama mencuat. Sejak program dimulai pada Januari 2025, sedikitnya 40.759 orang tercatat menjadi korban dugaan keracunan hingga awal Agustus 2026. Pada periode yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjatuhkan sanksi terhadap ribuan dapur penyedia makanan. Data BGN per 29 Mei 2026 mencatat 8.182 SPPG pernah disuspend dan 2.213 SPPG masih berstatus suspend. Pada Agustus 2026, BGN juga mencopot 137 kepala SPPG karena berbagai pelanggaran. Bahkan pimpinan BGN sudah berganti tiga kali. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah pelanggaran terjadi. Melainkan, mengapa sistem pengawasan belum mampu memastikan makanan yang diterima anak-anak tak menyebabkan sakit? **SELENGKAPNYA DI HAL 11...**

REKAM KASUS DUGAAN KERACUNAN MBG TAHUN 2026

Anambas, Kep. Riau

- Tanggal: 15-16 April 2026
- Korban: 155 siswa
- Penyebab: Belum terkonfirmasi.
- Sanksi: SPPG dihentikan sementara.

Duren Sawit, Jaktim

- Tanggal: 2 April 2026
- Korban: 72 siswa
- Penyebab: Belum terkonfirmasi
- Sanksi: SPPG diperiksa

Surabaya, Jawa Timur

- Tanggal: 11 Mei 2026
- Korban: ±200 siswa
- Penyebab: Masih diperiksa
- Sanksi: SPPG disuspend.

Lombok Timur, NTB

- Tanggal: April 2026
- Korban: 51 orang
- Penyebab: Belum terkonfirmasi
- Sanksi: SPPG Jurit Baru ditutup sementara.

Tulungagung, Jawa Timur

- Tanggal: 27 Juli 2026
- Korban: 103 orang
- Penyebab: Belum diketahui.
- Sanksi: SPPG Pakisrejo ditutup sementara

Bangkalan, Jawa Timur

- Tanggal: 4 Juni 2026
- Korban: 84 siswa
- Penyebab: Belum terkonfirmasi
- Sanksi: Investigasi Satgas MBG; 12 siswa sempat dirawat.

Nganjuk, Jawa Timur

- Tanggal: 2 September 2026
- Korban: 49 siswa SMAN 3 Nganjuk
- Penyebab: Belum diketahui; masih diverifikasi..
- Sanksi: Investigasi dan observasi medis masih berlangsung.

Agam, Sumatera Barat

- Tanggal: 1 September 2026
- Korban: 334 siswa dan guru
- Penyebab: Belum terkonfirmasi.
- Sanksi: Distribusi MBG di Palupuah dihentikan sementara.

Sidoarjo, Jawa Timur

- Tanggal: 1 September 2026
- Korban: 566 orang
- Penyebab: Belum diketahui
- Sanksi: SPPG Kalitengah disuspend 30 hari; BGN mengusulkan kepala SPPG dicopot.

Dumai, Riau

- Tanggal: 13 Agustus 2026
- Korban: 40 siswa + 1 guru
- Penyebab: Dugaan sementara berasal dari cabai pada bakso, tetapi masih menunggu hasil laboratorium.
- Sanksi: SPPG disuspend & kepala SPPG dinonaktifkan sementara.

Total terdapat 19 lembaga pendidikan yang terdampak akibat kejadian ini. Selain pesantren, ada juga SMA, SMP, SD hingga TK. Seluruhnya berada di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Para santri kini menjalani perawatan di delapan rumah sakit rujukan. (ANTARA)



POLISI KEJAR AKTOR DI BALIK KERUSUHAN 27 AGUSTUS, MASSA BERTALI PUTIH IKUT DIDALAMI

Kerusuhan yang pecah setelah demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026 belum sepenuhnya terurai. Polda Metro Jaya tidak hanya mengejar pelaku perusakan dan kekerasan di lapangan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan, mengorganisasi, hingga membiayai rangkaian kerusuhan. Polisi juga menelusuri sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial, termasuk kemunculan kelompok massa yang terlihat menggunakan ikatan tali putih.

Kerusuhan berlangsung di sejumlah titik, mulai dari kawasan Gedung DPR/MPR hingga Pejompongan, Jakarta Pusat. Setelah aksi penyampaian pendapat berakhir dan sebagian massa meninggalkan lokasi, muncul kelompok yang melakukan vandalisme, perusakan fasilitas umum, serta kekerasan. Polisi sebelumnya mengamankan 322 orang dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Mereka terdiri atas 162 orang dewasa dan 160 anak. Setelah menjalani pemeriksaan, sebanyak 273 orang dipulangkan, termasuk 141 anak.

Perkara kemudian terus berkembang. Pada Rabu (2/9/2026), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan tiga orang kembali diamankan sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Ketiganya diduga terlibat dalam perusakan fasilitas di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Dalam perkembangan yang dilaporkan, jumlah tersangka mencapai 52 orang. Sementara dalam konferensi pers, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut penyidik telah menetapkan 47 orang sebagai tersangka. Angka tersebut merupakan perkembangan penanganan perkara yang terus diperbarui penyidik.

Iman mengatakan penyidikan tidak berhenti pada para pelaku yang telah diamankan. Polisi kini berusaha membongkar kemungkinan adanya aktor yang memiliki peran lebih besar. "Kami terus berkomitmen untuk mengusut aktor-aktor intelektual maupun penggerak, penyedia dana dalam kerusuhan yang ditimbulkan," kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9).

Dugaan adanya mobilisasi menjadi salah satu pintu masuk penyidikan. Polisi menilai kelompok-kelompok yang muncul di sejumlah titik tidak serta-merta berdiri sendiri. "Sehingga ini adalah rombongan atau kelompok perusuh. Walaupun terlihat pembagian (klaster), namun kami menduga ada mobilisasi," ujar Iman.

Salah satu petunjuk yang kini



dianalisis ialah rekaman video amatir yang memperlihatkan sekelompok massa dengan ikatan tali putih. Polda Metro Jaya menyatakan video tersebut menjadi bagian dari bahan penyelidikan dan penyidikan. Polisi masih mendalami

siapa orang-orang dalam rekaman itu, bagaimana mereka bergerak, serta apakah keberadaan tali putih tersebut berkaitan dengan pengorganisasian massa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik berterima kasih atas berbagai rekaman amatir yang diunggah masyarakat karena dapat membantu mengungkap rangkaian peristiwa. Namun, polisi tidak bisa serta-merta menjadikan seluruh video yang beredar sebagai alat bukti. Penyidik terlebih dahulu harus memastikan keaslian rekaman tersebut.

"Nah terkait, makanya tadi disampaikan Dirreskrim Polda metro jaya berterima kasih terkait tentang adanya unggahan video amatir terkait peristiwa bener ya. Itu salah satu proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan Ditreskrim," kata Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (2/9).

Persoalannya, arus informasi mengenai kerusuhan juga bercampur dengan konten manipulatif. Polisi menyebut sebagian video yang

beredar diduga merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan atau AI. Karena itu, penyidik melakukan analisis untuk membedakan rekaman asli dari video yang telah dimanipulasi.

"Karena banyak video yang sebenarnya sesuai fakta dan peristiwa, tapi dibuat AI generate, nah tapi penyidik tidak akan tidaknakan terganggu oleh berita hoaks makanya sudah kita stamp, berita hoaks, misinformasi, AI generate, tetapi informasi ini masih kita analisa terkait video tersebut," ujar Budi.

Selain video, penyidik telah memeriksa 14 saksi dan melakukan pemeriksaan serta uji laboratorium terhadap rekaman CCTV dan berbagai video yang beredar di media sosial. Bukti digital tersebut dicocokkan

dengan keterangan saksi untuk menyusun kembali kronologi dan mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau ormas dalam rangkaian kerusuhan. Namun, hingga kini Polda Metro Jaya belum menyatakan ada ormas tertentu yang bertanggung jawab. Polisi juga belum menemukan indikasi bahwa pelaku pengeroyokan yang menyebabkan Bambang Setiawan, 59 tahun, meninggal dunia, merupakan anggota komunitas tertentu.

Budi menjelaskan pengamanan demonstrasi pada 27 Agustus melibatkan sejumlah unsur.

"Saya sampaikan ya, Polda Metro Jaya mengajukan permohonan TNI kepada Kodam Jaya, kepada Pemprov DKI melalui Dinkes, dishub, satpol PP, serta kita mengajukan pamdal DPR," kata Budi. Keterangan tersebut menjadi konteks bahwa pengamanan aksi melibatkan sejumlah institusi, meski keterlibatan unsur-unsur tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan mereka dalam kerusuhan.

Sketas Pelaku Pengeroyokan

Kasus kematian Bambang di Pejompongan menjadi salah satu perkara yang masih dikejar polisi. Penyidik telah memperoleh dua sketsa wajah pria yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Sketsa dibuat berdasarkan keterangan saksi yang kemudian dicocokkan dengan petunjuk digital, termasuk CCTV dan video di sekitar lokasi. Kedua pria tersebut hingga kini masih dalam pengejaran.

Polda Metro Jaya juga menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam perusakan kamera CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kamera pemantau di sekitar lokasi menjadi bagian penting dalam penyidikan karena rekamannya dapat membantu polisi melacak pergerakan kelompok massa sekaligus mengidentifikasi pelaku perusakan maupun kekerasan. (wid ist,kum/dya)



Massa bawa bambu dan ikat kepala menyusup ke kelompok demo pada 27 Agustus 2026. (Ist)

POLEMIK DENGAN PURBAYA BERLANJUT: PENGUNAAN SAL WAJIB DISETUJUI DPR

Polemik mengenai kewenangan pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) kembali mengemuka dalam pembahasan RAPBN 2027. Komisi XI DPR RI menegaskan penggunaan SAL pada tahun anggaran berjalan harus memperoleh persetujuan parlemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam rapat pengambilan keputusan atas asumsi dasar RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

"Penggunaan saldo anggaran lebih yang kita kenal dengan SAL pada tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Misbakhun saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR juga meminta pemerintah mengelola SAL secara prudent dan optimal karena dana tersebut berfungsi sebagai penyangga fiskal atau fiscal buffer untuk menghadapi ketidakpastian serta risiko fiskal. Sikap itu sekaligus mempertegas posisi parlemen setelah sebelumnya terjadi perbedaan pandangan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai penempatan SAL di bank-bank Himbara.

Polemik tersebut bermula dalam rapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan pada Juli 2026. Ketika itu, Purbaya menyatakan penempatan SAL di Himbara merupakan bagian dari pengelolaan kas pemerintah sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR. Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit berpendapat kebijakan tersebut harus memperoleh persetujuan parlemen dengan merujuk Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

"Kalau ada penempatan, kan harus persetujuan DPR. Nanti lihat di UU-nya. Kalau 2025 memang tidak, tetapi di [UU APBN] 2026 harus persetujuan DPR," ujar Dolfie dalam rapat 15 Juli 2026.

Perbedaan tafsir itu muncul karena UU APBN 2026 memang membedakan penggunaan SAL berdasarkan tujuannya. Pasal 28 mengatur pemerintah dapat menggunakan SAL antara lain ketika realisasi penerimaan tidak sesuai target, terdapat kebutuhan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melampaui pagu, kinerja anggaran telah tercapai, atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Namun, penggunaan SAL selain untuk pengelolaan kas, menutup pelebaran defisit, dan kondisi tertentu terkait penarikan Surat Berharga Negara (SBN), harus dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPR.

Purbaya pada akhirnya menyatakan pemerintah akan meminta persetujuan DPR apabila SAL harus ditarik dari



Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) usai Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (2/9/2026). (dok.Kementerian Keuangan)

sistem keuangan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya liquidity shock atau kejutan likuiditas akibat penarikan dana secara mendadak.

"Kan kita bekerja sama dengan bank sentral, nanti kalau kita terpaksa narik pun, itu kan SAL ya. SAL itu nggak dipakai sebelum dapat persetujuan DPR kan. Sebagian taruh di BI, sebagian taruh di sistem perbankan sesuai dengan kebutuhan manajemen cashflow kita," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah sebelumnya memperpanjang penempatan sebagian dana tersebut di sistem perbankan. Purbaya menyebut dana pemerintah yang ditempatkan dalam sistem keuangan saat ini sekitar Rp200 triliun dan masa penempatannya diperpanjang hingga Juli 2027. Kebijakan itu ditujukan memberi ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit tanpa dibayangi ketidakpastian mengenai kapan dana tersebut akan ditarik.

Pada Agustus, Purbaya juga mengatakan penempatan SAL di perbankan telah meningkatkan likuiditas dan berpotensi mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi.

Kebijakan tersebut bukan tanpa dinamika. Pada Agustus, pemerintah menyatakan sebagian penempatan SAL yang sebelumnya direncanakan berakhir pada Desember 2026 diperpanjang sampai Juli 2027. Purbaya mengatakan bank sempat ragu menyalurkan kredit karena tidak mengetahui apakah dana tersebut akan ditarik pada akhir tahun. Pemerintah kemudian menambah penempatan dana secara bertahap.

"Rp200 triliun sampai dengan Juli tahun depan. Supaya mereka leluasa menyalurkan kredit," kata Purbaya

pada 5 Agustus 2026.

Purbaya juga menilai penempatan SAL di perbankan justru dapat memperkuat transmisi likuiditas ke sektor riil. Menurut dia, pertumbuhan kredit terakhir berada di kisaran 13,8 persen dan berpotensi menembus 20 persen apabila likuiditas tersebut dipertahankan.

"Itu (SAL) kalau ditahan terus ke depan, cukup menciptakan pertumbuhan kredit di atas 20 persen. Data terakhir kan kredit 13,8 persen, meningkat dibanding sebelumnya karena pengaruh likuiditas di sistem keuangan kita tadi," ujar Purbaya pada 2 September.

Namun, DPR menekankan bahwa fungsi SAL tidak sebatas menjadi sumber likuiditas perbankan. Misbakhun meminta pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan. Pada saat yang sama, APBN harus tetap mampu berfungsi sebagai shock absorber dan agent of development di tengah ketidakpastian ekonomi global. Posisi ini sejalan dengan desain kebijakan fiskal pemerintah yang menempatkan APBN sebagai instrumen untuk meredam guncangan ekonomi.

Penegasan soal SAL itu datang bersamaan dengan kesepakatan pemerintah dan DPR atas asumsi dasar RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen. Pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun, sehingga defisit dipatok Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

APBN 2027: ASUMSI MAKRO & TARGET PEMBANGUNAN

Asumsi Ekonomi Makro

- Pertumbuhan ekonomi: 6,0%
- Inflasi: 2,5%
- Rupiah: Rp17.500/US\$
- SBN 10 tahun: 6,9%
- ICP: US\$75/barel
- Lifting minyak: 612.500 barel/hari
- Lifting gas: 954.000 barel setara minyak/hari

Target Pembangunan

- Kemiskinan: 6,0-6,5%
- Kemiskinan ekstrem: 0-0,5%
- Pengangguran terbuka: 4,30-4,87%
- Gini Ratio: 0,360-0,365
- GNI per kapita: US\$5.800-5.840

Target Pertumbuhan 6%

- Investasi (PMTB): 7,0%
- Ekspor: 7,5%
- Konsumsi pemerintah: 5,6%
- Konsumsi rumah tangga: 5,4%

Target Pertumbuhan 6%

- Defisit maksimal 2,40% PDB
- Pelaksanaan APBN dievaluasi setiap 3 bulan
- Kesepakatan pemerintah-Komisi XI DPR RI menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027

Dari sisi pembangunan, pemerintah dan DPR menargetkan tingkat kemiskinan 6-6,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, rasio Gini 0,360-0,365, serta tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen. Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta orang, dengan proporsi pekerjaan formal 40,81 persen. Target lainnya mencakup GNI per kapita US\$5.800-5.840 dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,84.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah dan DPR mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, penguatan investasi, penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), hilirisasi dan industrialisasi. Belanja negara juga diarahkan untuk menopang delapan program kerja prioritas nasional. Dengan defisit yang tetap harus dijaga dalam batas aman, Misbakhun mengingatkan pembiayaan tidak boleh menjadi satu-satunya jalan untuk menopang APBN. (tin,ist,rls,par/dya)

KEMACETAN DI KETAPANG: TRUK BERGERAK 50 METER TIAP 30 MENIT

Kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, belum juga sepenuhnya terurai. Selama delapan hari terakhir, antrean kendaraan didominasi truk besar mengular di jalur Situbondo–Banyuwangi. Pada Rabu (2/9/2026), panjang antrean bahkan sempat mencapai sekitar 12 kilometer.



Antrean truk di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (1/9/2026). Ekor kemacetan pada Rabu (2/9/2026) mencapai belasan km. (foto ASDP Ketapang)

Di tengah kepadatan itu, kendaraan hanya bergerak perlahan. Kanit Turjakwali Satlantas Polresta Banyuwangi Ipda Rudy Wicaksono mengatakan dalam kondisi tertentu kendaraan hanya bergeser sekitar 50 meter dalam waktu lebih dari 30 menit.

“(Bergeser) 50 meter bisa lebih dari setengah jam,” kata Rudy, Rabu (2/9/2026).

Situasi tersebut membuat sopir harus berlama-lama berada di dalam kendaraan. Sebagian memilih tidur sambil menunggu antrean bergerak. Polisi menerapkan sistem buka-tutup untuk menjaga arus tetap berjalan. Pada sekitar pukul 01.00 hingga 02.00 WIB, kendaraan kecil yang memungkinkan langsung masuk ke pelabuhan diloloskan di tengah antrean truk.

“Jam 01.00, jam 02.00 pagi meloloskan kendaraan kecil karena bisa masuk. Mayoritas truk besar (yang antre),” ujar Rudy.

Petugas bahkan harus membangunkan sopir yang tertidur ketika antrean kembali bergerak. “Banyak yang tidur. Kami buka tutup, bangunkan sopir jam 05.00,” katanya.

Truk-truk besar diarahkan melalui jalur kiri menuju kantong parkir Dermaga Bulusan.

Sementara kendaraan kecil yang dapat langsung masuk ke area pelabuhan diarahkan mengikuti petugas. Polisi juga meminta masyarakat yang tidak memiliki

kepentingan mendesak menghindari kawasan Ketapang agar kepadatan tidak semakin parah.

“Kalau tidak ada keperluan urgent hindari wilayah Ketapang supaya tidak makin penuh,” kata Rudy.

Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kendaraan. ASDP menjelaskan kepadatan terjadi ketika kapasitas layanan pelabuhan belum dapat beroperasi seperti kondisi normal akibat pekerjaan peningkatan infrastruktur di sisi Ketapang dan Gilimanuk. Proyek tersebut mencakup peningkatan kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk serta pengembangan dermaga ponton Pelabuhan Ketapang menjadi movable bridge (MB) permanen dengan daya dukung hingga 50 ton.

Pekerjaan di Dermaga 2 Gilimanuk dimulai sejak 21 Agustus 2026. Dermaga tersebut sebelumnya digunakan dengan kapasitas terbatas dan kini diperkuat agar mampu melayani kendaraan dengan muatan hingga 50 ton. Di sisi Ketapang, dermaga ponton juga dikembangkan menjadi MB berkapasitas serupa. Pengembangan ini ditujukan untuk memperkuat layanan kendaraan logistik berukuran besar sekaligus meningkatkan ketahanan operasional lintasan Jawa-Bali.

Dampaknya terasa pada jumlah kapal yang dapat dioperasikan. Dalam kondisi normal, lintasan Ketapang–Gilimanuk mampu mengoperasikan sekitar 28 kapal. Saat

pekerjaan berlangsung, ASDP menyebut jumlah kapal yang beroperasi turun menjadi 25 kapal. Pada saat yang sama, ASDP mengerahkan tiga kapal bantuan untuk mempercepat penguraian antrean.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pihaknya memaksimalkan kapal berkapasitas besar dan berkoordinasi dengan regulator serta pemangku kepentingan di lapangan.

“K a m i m e m a k s i m a l k a n pengoperasian kapal berkapasitas besar, termasuk mengerahkan kapal bantuan untuk mempercepat penguraian antrean. Evaluasi dan perbaikan terus kami lakukan agar layanan pada lintasan vital ini tetap optimal,” ujar Heru, Rabu.

Tiga kapal bantuan tersebut dioperasikan dengan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk memangkas waktu sandar. General Manager ASDP Cabang Ketapang

Media Syahrianto mengatakan KMP Atayana dan KMP Portlink VII menerapkan pola TBB di Pelabuhan Gilimanuk, sedangkan KMP Liputan XII menjalankan pola serupa di Pelabuhan Ketapang. “Skema TBB ini mempercepat waktu rotasi kapal secara signifikan sehingga penumpukan kendaraan dapat terurai lebih cepat,” kata Media.

Kemacetan panjang di lintasan ini sebenarnya bukan persoalan baru. Pada Juli 2026, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut problem utama bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan infrastruktur dermaga. Dari sekitar 56 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang–Gilimanuk, hanya sekitar 28–30 kapal yang dapat dioperasikan setiap hari karena keterbatasan fasilitas sandar.

Ketua Gapasdap Khoiri bahkan menyebut kapasitas kapal yang tersedia mengalami surplus hingga 50 persen. Menurut dia, kapal justru harus menunggu giliran untuk beroperasi karena keterbatasan dermaga. Gapasdap mengusulkan pembangunan infrastruktur dermaga secara bertahap untuk mengejar pertumbuhan arus kendaraan dan logistik di jalur Jawa-Bali.

Di tengah kemacetan yang masih berlangsung, ASDP meminta pengguna jasa menyesuaikan waktu perjalanan dan mengantisipasi waktu tempuh yang lebih panjang. Perusahaan juga memastikan tiket yang sudah dibeli tidak otomatis hangus akibat antrean.

“Pengguna jasa tidak perlu khawatir tiketnya hangus akibat antrean ini. Dalam kondisi force majeure, seluruh tiket yang sudah dibeli tetap berlaku dan akan dilayani sesuai ketentuan,” tegas Media. (mok,ist/dya)



CCTV kemacetan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi (Dok. Pemkab Banyuwangi)

TIGA NYAWA MELAYANG, MUI JATIM DESAK SOUND HOREG DILARANG

Tiga warga Jawa Timur meninggal dalam insiden yang berkaitan dengan sound horeg sepanjang Agustus 2026. Rangkaian kejadian itu kembali memicu desakan agar pemerintah memperketat, bahkan melarang penggunaan pengeras suara berdaya tinggi tersebut di ruang publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menjadi salah satu pihak yang meminta pemerintah mengambil langkah lebih tegas.

Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan keputusan yang melarang sound horeg. "Betul, kami mendorong, mengusulkan ke Pemprov Jatim, ke Ibu Gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan larangan sound horeg," kata Ma'ruf, dikutip Rabu (2/9/2026).

Desakan tersebut muncul setelah tiga kematian terjadi dalam rentang waktu sebulan. Korban pertama, SN (29), meninggal ketika tertidur di atas truk bermuatan sound horeg di Jalan Krasak, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Kepala korban terbentur gapura ketika kendaraan melintas. Korban kedua adalah Bonari (44), warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Ia diduga mengalami serangan jantung setelah menenggak arak ketika mengikuti karnaval sound horeg dalam rangka HUT ke-81 RI pada Minggu (23/8).

Korban ketiga ialah Slamet Timbang (57), warga Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Jember. Slamet meninggal setelah tertimpa kanopi dan tembok ketika mengantar istrinya ke apotek. Peristiwa itu berlangsung di tengah karnaval dan parade sound horeg yang digelar Desa Wringinagung pada Sabtu (29/8) sekitar pukul 10.30 WIB.

Rangkaian kejadian tersebut membuat persoalan sound horeg bergeser dari sekadar perdebatan mengenai kebisingan menjadi isu keselamatan warga.



Seorang pria meninggal dunia setelah tertimpa kanopi dan bagian tembok atas Apotek Anissa 22 di Dusun Pondok Jeruk, Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).dok

Ma'ruf mengatakan MUI Jatim sejak awal telah mengambil sikap terhadap penggunaan sound horeg yang dinilai mengganggu atau membahayakan masyarakat. MUI Jatim telah mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan sound horeg dalam kondisi tertentu. "Sejak awal MUI Jatim tegas sound horeg itu haram dengan berbagai pertimbangan termasuk medis. Cuma kami bukan bagian eksekutor untuk melakukan pengawasan, dan itu ada di kepolisian. Saat ini pengawasan terhadap sound horeg saya kira kendor," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya imbauan. Ia menilai pemerintah membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat agar aparat memiliki dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan dan penindakan. "Dan tentu surat edaran atau surat imbauan dari Pemprov Jatim kurang kuat secara legal standing. Saya kira perlu surat keputusan gubernur atau dari

bupati/wali kota agar sound horeg ini tidak memakan korban lagi," katanya.

Ia juga menyoroti belum seragamnya kebijakan pemerintah daerah di Jawa Timur. Sejumlah kabupaten dan kota disebut telah mengambil langkah tegas dengan membatasi atau melarang sound horeg. Namun, menurut Ma'ruf, masih ada daerah yang memberikan ruang karena faktor kepentingan politik. "Jadi ada bupati atau wali kota yang saat kampanye itu bersama dengan sound horeg, jadi semacam kontrak politik. Sehingga tidak bisa tegas dengan adanya sound horeg. Kami dorong kepolisian juga aktif untuk melakukan pengawasan ketat," ujarnya.

Bagi MUI Jatim, jatuhnya korban membuat pendekatan berupa imbauan dinilai tidak lagi memadai. "Dulu saja ketika kami mengeluarkan fatwa haram itu masih belum ada korban, sekarang sudah terjadi memakan korban. Saya kira bersama-sama stakeholder harus membuat keputusan yang tegas," tutur Ma'ruf.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mendesak pemerintah menegakkan larangan terhadap sound horeg setelah tiga warga meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang berkaitan dengan aktivitas tersebut sepanjang Agustus 2026. Muhammadiyah menilai banyaknya dampak negatif membuat penggunaan sound horeg tidak lagi dapat dipandang semata sebagai hiburan.

DAFTAR 3 KEMATIAN TERKAIT SOUND HOREG DI JATIM (AGUSTUS 2026)

SN (29) - Jember

- 2 Agustus 2026
- Kru sound horeg.
- Tewas setelah kepalanya terbentur gapura saat berada di atas truk pengangkut perangkat sound horeg.
- Peristiwa terjadi ketika rombongan pulang dari karnaval di Desa Kaliwining, Rambipuji.

Bonari (44) - Banyuwangi

- 23 Agustus 2026
- Mengikuti karnaval sound horeg di Desa Sumbermulyo, Pesanggaran.
- Sempat berjalan sekitar 1 kilometer, kemudian oleng dan jatuh.
- Diduga mengalami serangan jantung setelah sebelumnya mengonsumsi arak.

Slamet Timbang (57) - Jember

- 29 Agustus 2026
- Sedang mengantar istrinya membeli obat di apotek.
- Tewas setelah tertimpa kanopi dan tembok ketika parade sound horeg berlangsung.
- Warga menduga getaran keras sound horeg berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sudah tua dan lapuk

Sekretaris PWM Jawa Timur Biyanto mengatakan masyarakat dan aparat perlu memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi fenomena tersebut. "Karena itu, masyarakat bersama aparat mesti memiliki kesamaan pandangan. Menimbang begitu banyak dampak negatif, maka larangan terhadap sound horeg harus ditegakkan," kata Biyanto, Rabu (2/9/2026).

Biyanto menyebut sound horeg terbukti lebih banyak menimbulkan mudarat. Selain telah menyebabkan korban jiwa, aktivitas tersebut juga berdampak pada lingkungan sekitar. "Keberadaan sound horeg terbukti banyak mudaratnya. Dampak negatif yang ditimbulkan juga demikian jelas, apalagi sudah mengakibatkan korban jiwa. Di samping kerusakan bangunan di area sekitar, belum lagi kebisingan suara yang terjadi," ujarnya.

Muhammadiyah Jatim juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran. Biyanto mengatakan ketegasan tersebut penting untuk mencegah konflik antara penyedia jasa, penyewa, dan warga yang merasa terganggu. "Supaya tidak terjadi clash antarwarga, terutama penyedia jasa, penyewa, dan pihak-pihak yang merasa terganggu, aparat harus tegas menegakkan aturan. Ketegasan aparat penting untuk memitigasi agar masyarakat tidak main hakim sendiri," katanya. (tin,rls,dtc,kcm/dya)



Evakuasi jenazah kru sound horeg tewas terbentur gapura di Arjasa, Jember (Foto: Dok. Istimewa)

Pemkab Malang **Belum Rekom** Pembangunan Koperasi Merah Putih di Sawah Dilindungi

MALANG- Sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Malang direncanakan dibangun di area Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Namun hingga kini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang mengakui belum ada rekomendasi perubahan penggunaan tanah.

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, mengatakan kewenangan untuk melepaskan atau mengubah penggunaan tanah yang berstatus LSD berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bukan di DPKPCK Kabupaten Malang.

"Tetapi sementara saya tidak mengeluarkan dulu rekomendasinya. Kecuali mereka mengajukan surat validasi ke Kementerian ATR/BPN RI dan yang akan melepaskan nanti dari Kementerian ATR/BPN RI bukan dari Cipta Karya Kabupaten Malang," ujar Habibah, Rabu (2/9/2026).

Disebutkannya, di Kabupaten Malang terdapat sejumlah lahan di kawasan hutan dan LSD yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan KDKMP. Untuk lahan di

kawasan hutan terdapat 7 titik, sedangkan di area LSD terdapat sekitar 10 titik.

Khusus untuk pembangunan KDKMP yang berada di area LSD, menurutnya, pihak terkait harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan perubahan penggunaan tanah yang berlaku.

Habibah menjelaskan, penetapan suatu lahan sebagai LSD oleh Kementerian ATR/BPN RI merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Menurutnya perlindungan terhadap lahan sawah tersebut diperkuat dengan sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2024.

Lebih lanjut, Habibah menyampaikan permohonan perubahan penggunaan tanah pada LSD harus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI.

Permohonan tersebut harus dilengkapi sejumlah dokumen administrasi. Di antaranya surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI.

Pemohon juga harus menyertakan surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun yang dibuat di atas materai, serta peta atau sketsa lokasi yang dimohon untuk



Ilustrasi: Bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. (foto: ist)

menunjukkan batas wilayah tanah yang diajukan.

Persyaratan lainnya, yakni berupa bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah. Bukti tersebut dapat berupa Surat Pelepasan Hak, Akta Jual Beli (AJB), maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). (Santi/Dya)

Lahan Bakal Sekolah Rakyat Kurang, Pemkot Malang Berburu Aset Daerah



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Baihaqi. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah berburu aset daerah di sekitar kawasan Arjowinangun untuk memenuhi kekurangan 0,6 hektare lahan bakal Sekolah Rakyat. Dari total kebutuhan 5,8 hektare, saat ini lahan seluas 5,2 hektare telah dinyatakan siap berdasarkan data Sertifikat Hak Pakai (SHP).

"Kalau sesuai dengan data SHP yang kami pegang, untuk yang sudah ready itu 5,2 hektare. Tetapi kebutuhannya 5,8 hektare, sehingga kurang 0,6 hektare dan ini masih kami cari, kami inventarisir," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Baihaqi, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, Pemkot Malang tidak berencana melakukan pembebasan lahan untuk memenuhi kekurangan tersebut. Pemerintah akan memaksimalkan aset tanah milik Pemkot yang berada di sekitar lokasi yang telah diajukan.

Tim BKAD, lanjut Baihaqi, saat ini juga masih melakukan penelusuran terhadap tanah-tanah di sekitar lokasi, terutama lahan yang berbatasan atau menempel dengan kawasan yang telah disiapkan.

"Kami masih mencari tanah-tanah di sekitar lokasi yang diajukan, yang istilahnya menempel dengan lokasi yang diajukan sehingga kebutuhan 5,8 hektare nanti akan kami penuhi," katanya.

Baihaqi menjelaskan, lahan yang disiapkan tersebut berada di kawasan Jalan Babatan, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, tidak jauh dari bangunan Islamic Center atau gedung Grha Purva Praja yang merupakan kompleks perkantoran terintegrasi milik Pemkot Malang.

Saat ini, menurutnya, kondisi eksisting sebagian lahan masih digunakan untuk tanaman tebu. Namun, tanaman tersebut disebut sudah mendekati masa panen sehingga dalam waktu dekat lahan dapat disiapkan lebih lanjut.

Terkait status pemanfaatan lahan apabila nantinya pengajuan Sekolah Rakyat disetujui pemerintah pusat, Baihaqi menyebut Pemkot Malang masih menunggu regulasi teknis.

Dikatakannya, pemerintah daerah masih menunggu kepastian mekanisme pemanfaatan aset tersebut, apakah nantinya menggunakan skema pinjam pakai atau hibah kepada pemerintah pusat.

"Kami juga masih menunggu regulasi dari pusat. Apakah nanti sifatnya ini pinjam pakai atau dihibahkan ke pemerintah pusat. Kami menunggu regulasi itu. Yang penting kami siapkan dulu lahannya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, M Sailendra, menyampaikan pengajuan lahan tersebut masih dalam proses verifikasi pemerintah pusat.

Menurutnya, lahan di Arjowinangun yang diajukan Pemkot Malang sebelumnya telah ditinjau oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). (Santi/Dya)

Rata-rata Harga Minyak Dunia 2026

Januari

Global : **US\$63,70**

ICP : **US\$64,41**

Februari

Global : **US\$68,00**

ICP : **US\$68,79**

konflik AS-Israel-Iran mulai memicu kenaikan.

Maret

Global : **US\$95,60**

ICP : **US\$102,26**

Selat Hormuz ditutup, harga melonjak.

April

Global : **US\$103,90**

ICP : **US\$117,31**

puncak krisis pasokan.

Mei

Global : **US\$100,40**

ICP : **US\$106,56**

mulai terkoreksi.

Juni

Global : **US\$81,70**

ICP : **US\$83,45**

Hormuz kembali dibuka.

Juli

Global : **US\$79,80**

ICP : **US\$81,68**

Pasokan mulai pulih.

Agustus-awal September

Global : **US\$90-95**

Tensi geopolitik kembali memanasi.

Para pengemudi mengantre di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar di Teheran pada 25 Agustus 2026. (AFP)



Babak Baru Konflik Hormuz

PERTAMA KALI, AS SERANG KAPAL TANKER IRAN

Serangan Amerika Serikat (AS) terhadap dua kapal tanker milik pemerintah Iran menandai perubahan penting dalam konflik yang berpusat di Selat Hormuz. Untuk pertama kalinya, Washington menjadikan kapal tanker Iran sebagai sasaran balasan langsung atas serangkaian serangan terhadap kapal komersial di jalur pelayaran strategis tersebut.

(CENTCOM) mengatakan pasukannya menyerang sejumlah fasilitas Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk sistem pertahanan udara, radar, fasilitas komunikasi, aset maritim, kemampuan penyebaran ranjau, peluncur rudal jelajah antikapal, serta fasilitas yang berkaitan dengan drone serang. Secara keseluruhan, sekitar 100 sasaran disebut terkena serangan AS.

"Pasukan AS menyerang target-target Korps Garda Revolusi Islam (Iran), termasuk lokasi pertahanan udara, sistem radar, aset dan fasilitas maritim, kemampuan penyebaran ranjau, dan lokasi komunikasi," kata CENTCOM dalam pernyataannya melalui media sosial X.

Menurut CENTCOM, operasi tersebut merupakan respons terhadap upaya serangan IRGC terhadap kapal komersial di Selat Hormuz sekaligus serangan terhadap personel militer AS yang ditempatkan di kawasan tersebut. Trump kemudian memperingatkan Teheran agar tidak membalas serangan itu dengan serangan baru.

"Jika negara Iran yang gagal itu membalas serangan yang sangat beralasan ini, maka mereka akan diserang kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan dahsyat," kata Trump melalui akun Truth Social.

Ancaman tersebut memperlihatkan bahwa serangan terhadap dua tanker Iran bukan operasi yang berdiri sendiri. Washington sedang mengubah pola pembalasan

dalam konflik yang selama berbulan-bulan telah menjadikan Selat Hormuz sebagai salah satu titik paling rawan di Timur Tengah.

Sebelumnya, AS menggunakan blokade laut untuk membatasi aktivitas Iran di jalur tersebut. Kini, kapal tanker pemerintah Iran sendiri masuk dalam daftar sasaran pembalasan.

Perubahan itu terjadi setelah sejumlah kapal komersial mengalami serangan di sekitar Selat Hormuz. Sehari sebelum serangan AS, dua supertanker yang membawa minyak mentah Saudi juga terkena proyektil tak dikenal ketika bergerak keluar dari selat. Kedua kapal tersebut adalah Sidr berbendera Saudi dan Senegal Prosperity berbendera Liberia.

Keduanya membawa masing-masing sekitar 2 juta barel minyak mentah Saudi yang dimuat dari terminal Juaymah.

Serangan terhadap kapal-kapal tersebut menambah kekhawatiran terhadap keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) juga melaporkan sebuah kapal tanker dihantam tiga proyektil ketika melintas di sekitar sisi Oman pada Senin malam. Insiden itu terjadi sekitar 17 mil laut sebelah timur Khasab, Oman.

Selat Hormuz bukan sekadar titik konflik antara Washington dan Teheran. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan

Teluk Oman tersebut merupakan salah satu koridor energi terpenting dunia. Gangguan terhadap pelayaran di sana segera berimbas pada pasar minyak dan biaya pengiriman energi global.

Reuters melaporkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz telah menurun tajam akibat konflik dan blokade yang diberlakukan kedua pihak. Pada saat yang sama, sekitar 17 juta barel minyak masih melewati selat tersebut pada Senin, menurut Menteri Energi AS Chris Wright. Namun, eskalasi baru berpotensi kembali mengganggu arus tersebut.

Pasar energi langsung merespons perkembangan tersebut. Harga minyak Brent pada Rabu (2/9) berada di sekitar 94,76 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) sekitar 90,26 dolar AS. Kedua harga tersebut sempat mencapai level tertinggi sejak 24 Juli. Analisis memperingatkan harga Brent berpotensi menembus 100 dolar AS per barel jika eskalasi membuat lalu lintas kapal semakin terganggu.

Di sisi lain, Iran tidak tinggal diam. Teheran merespons gelombang serangan AS dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke sejumlah sasaran AS serta fasilitas yang digunakan Washington di kawasan Timur Tengah, termasuk di Yordania, Bahrain, Kuwait dan Irak. Sebagian besar serangan dilaporkan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan negara-negara sasaran. (gus,rtr;jaz,ist/dya)

Militer AS menyerang dua kapal tanker Iran pada Selasa (1/9/2026) waktu setempat. Kedua kapal disebut sedang berlabuh di lepas pantai Iran, di sebelah utara garis blokade angkatan laut AS. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan Axios berdasarkan keterangan sejumlah pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, kemudian dikutip Anadolu Agency, Rabu (2/9/2026).

Serangan tersebut dilakukan menggunakan drone tempur yang menembakkan rudal ke ruang mesin kedua kapal. Washington menyebut operasi itu sebagai bagian dari kebijakan baru yang disebut "tanker for tanker", yang telah mendapat persetujuan Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap serangan Iran terhadap kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.

Langkah Washington itu berlangsung bersamaan dengan gelombang serangan yang lebih luas terhadap Iran. Komando Pusat AS



Alami Kerusakan Otot Usai Dihukum 200 Squat, **Catat Bahayanya**

Hukuman fisik di tempat kerja berujung petaka bagi seorang pekerja muda di China. Perempuan bernama Yang itu harus menjalani perawatan setelah mengalami rhabdomyolysis, kondisi ketika jaringan otot mengalami kerusakan berat dan melepaskan kandungannya ke dalam aliran darah.

Kasus tersebut terjadi setelah Yang dipaksa melakukan ratusan squat oleh atasannya karena gagal memenuhi target pekerjaan. Alih-alih sekadar kelelahan atau nyeri otot seperti yang lazim muncul setelah berolahraga, aktivitas fisik mendadak itu membuat Yang mengalami kerusakan otot serius dan berisiko mengalami gangguan ginjal.

Mengutip South China Morning Post, Yang baru pindah ke Hangzhou, Provinsi Zhejiang, untuk memulai pekerjaan pertamanya. Ia bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan penyedia jasa bantuan pinjaman. Namun, posisi tersebut pada praktiknya merupakan pekerjaan telesales.

Manajer timnya, yang bernama Zhang, menetapkan target harian yang cukup berat. Setiap karyawan diwajibkan melakukan 200 panggilan telepon, mengundang sedikitnya satu calon klien, serta mendapatkan sedikitnya satu persetujuan kerja sama setiap hari.

Pada 28 Juli 2026, Yang tidak mampu memenuhi target tersebut. Atasannya kemudian memberikan

pilihan hukuman. Ia bisa membayar denda 50 yuan atau sekitar Rp110 ribu untuk setiap tugas yang tidak diselesaikan, atau menjalani hukuman fisik berupa squat. Yang memilih hukuman fisik karena tidak memiliki cukup uang dan khawatir kehilangan pekerjaan pertamanya.

"Akutak punya uang," kalimat tersebut disampaikan Yang ketika menjelaskan alasan memilih melakukan squat ketimbang membayar denda. Dalam rekaman yang dibuat sebagai bukti untuk atasannya, Yang melakukan squat dalam beberapa sesi di sejumlah lokasi di gedung kantor.

Meski pilihan awal yang diberikan atasannya adalah 100 kali squat, Yang pada akhirnya menjalani 200 kali squat. Setelah menyelesaikan hukuman itu, kondisi fisiknya memburuk. Ia tidak mampu berdiri dengan baik dan berjalan sempoyongan.

Kedua kakinya mengalami nyeri hebat. Namun, Yang tidak langsung mencari pertolongan medis. Kendala finansial membuatnya menahan rasa sakit selama beberapa hari.

Ia baru pergi ke rumah sakit lima hari kemudian, setelah menyadari warna urinenya berubah menjadi gelap. Perubahan warna urine menjadi gelap merupakan salah satu tanda penting rhabdomyolysis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut tiga gejala yang umum

muncul adalah nyeri otot yang lebih berat dari yang seharusnya, urine berwarna gelap seperti teh atau cola, serta tubuh terasa lemah atau kelelahan.

Gejala tersebut juga tidak selalu muncul segera setelah cedera otot. Pada sebagian orang, tanda-tandanya baru terlihat beberapa jam bahkan beberapa hari kemudian. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis Yang mengalami rhabdomyolysis. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel otot mengalami kerusakan dan melepaskan berbagai komponen ke dalam aliran darah, termasuk creatine kinase (CK) dan myoglobin.

Masalahnya bukan semata-mata pada otot yang rusak. Myoglobin yang dilepaskan dari jaringan otot dapat membebani ginjal dan dalam kondisi berat berkontribusi terhadap acute kidney injury atau gagal ginjal akut.

Hasil pemeriksaan laboratorium Yang menunjukkan kadar CK mencapai 16.000 U/L. Angka tersebut menunjukkan kerusakan otot yang sangat berat. Bahan awal menyebut angka 1.000 U/L sudah cukup untuk mengonfirmasi kondisi tersebut, tetapi dalam praktik klinis, batas diagnosis dapat berbeda bergantung pada pedoman dan konteks pasien.

CDC menekankan bahwa pemeriksaan CK darah merupakan pemeriksaan penting untuk memastikan rhabdomyolysis dan pasien dengan dugaan kondisi tersebut dapat membutuhkan pemeriksaan

berulang untuk memantau apakah kadar CK terus naik atau mulai turun. Yang beruntung tidak mengalami kerusakan ginjal permanen. Ia menjalani perawatan medis dan diminta beristirahat total. Setelah kondisi fisiknya terganggu akibat hukuman tersebut, Yang akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan.

Kasus Yang menunjukkan bahwa rhabdomyolysis bukan hanya persoalan atlet profesional. Kondisi tersebut juga dapat terjadi pada orang yang tiba-tiba melakukan aktivitas fisik berat yang belum biasa dilakukan tubuh.

Literatur medis mendeskripsikan exertional rhabdomyolysis sebagai kerusakan sel otot akibat aktivitas fisik berat. Aktivitas yang terlalu intens atau kontraksi otot yang dilakukan secara mendadak dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan otot.

Squat sendiri merupakan latihan yang banyak melibatkan otot tungkai, terutama kelompok otot paha dan bokong. Persoalannya bukan bahwa squat merupakan olahraga berbahaya. Yang menjadi risiko adalah beban, intensitas, jumlah repetisi, kondisi fisik seseorang, serta apakah tubuh sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut. Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa rhabdomyolysis akibat aktivitas fisik paling sering berkaitan dengan latihan yang berat. (farist/dya)

TWITTER HIDUP LAGI, SEDANG UJI COBA

Nama Twitter kembali muncul di dunia media sosial. Startup asal Virginia, Amerika Serikat, Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now, platform jejaring sosial baru yang mencoba menghidupkan kembali nama dan nuansa Twitter sebelum diambil alih Elon Musk.

Layanan tersebut kini memasuki tahap uji coba dan membuka akses awal dengan biaya US\$20. Operation Bluebird menyebut Twitter.now bukan upaya untuk sekadar menghidupkan platform lama, melainkan membangun layanan baru dengan penekanan pada kepercayaan, transparansi, dan kendali pengguna.

Peluncuran ini menarik perhatian karena terjadi di tengah sengketa hukum antara Operation Bluebird dan X Corp., perusahaan yang mengoperasikan platform milik Elon Musk.

Perselisihan bermula setelah Musk mengubah nama Twitter menjadi X pada 2023. Operation Bluebird kemudian berargument bahwa X telah meninggalkan identitas dan sejumlah kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek Twitter.

Salah satu pendiri Operation Bluebird, Stephen Coates, merupakan mantan pengacara Twitter sebelum era Musk. Ia meyakini perubahan nama tersebut membuka peluang untuk menggunakan kembali merek Twitter.

"Ketika X Corp. meninggalkan merek Twitter, kami melihat kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru: ruang publik yang diatur berdasarkan kepercayaan, transparansi, dan pilihan pengguna," kata Coates, seperti dikutip TechCrunch.

Coates menegaskan Twitter.now

tidak dimaksudkan untuk mengembalikan Twitter versi lama.

"Twitter.now bukanlah upaya untuk menghidupkan kembali platform lama. Kami sedang membangun layanan yang berbeda, dengan sinyal kepercayaan yang memberikan konteks untuk apa yang pengguna lihat dan alat yang memungkinkan pengguna-bukan algoritma yang buram untuk menentukan seberapa banyak kredibilitas dan kebisingan yang mencapai feed mereka," ujarnya.

Sengketa Merek dengan X

X Corp. menggugat Operation Bluebird di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Delaware pada Desember 2025. X juga meminta pengadilan mengeluarkan perintah untuk menghentikan peluncuran platform baru tersebut.

Operation Bluebird sebelumnya mengajukan permohonan untuk membatalkan sejumlah pendaftaran merek milik X, dengan alasan merek Twitter dan Tweet telah ditinggalkan setelah rebranding.

Dalam dokumen perkara, Operation Bluebird juga mengajukan permohonan merek TWITTER dan TWEET kepada otoritas merek dagang Amerika Serikat.

Perkara tersebut belum berakhir.

Dalam sidang April 2026, Hakim Pengadilan Distrik AS Colm Connolly memberikan pandangan sementara dari kursi hakim bahwa X tampaknya telah meninggalkan klaim kekayaan intelektual atas kata "tweet" dan logo burung Twitter, serta kemungkinan juga merek "Twitter". Namun, hingga Twitter.now diluncurkan, belum ada putusan tertulis final mengenai hal tersebut.

Operation Bluebird menafsirkan

pernyataan hakim tersebut sebagai alasan untuk melanjutkan peluncuran.

Dengan demikian, kemunculan Twitter.now tidak berarti secara hukum bahwa Operation Bluebird telah resmi memenangkan hak atas merek Twitter. Status merek tersebut masih menjadi bagian dari sengketa hukum.

Secara visual, Twitter.now sengaja mempertahankan sejumlah elemen yang mengingatkan pengguna pada Twitter sebelum rebranding.

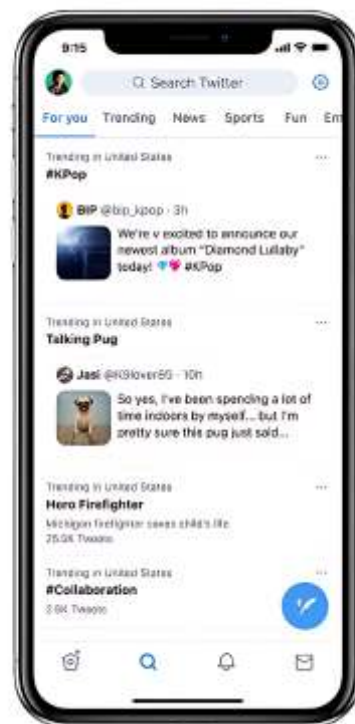
Platform tersebut menghadirkan percakapan publik secara real-time, kolom balasan, serta mekanisme berbagi unggahan yang menyerupai konsep lama Twitter.

Namun, Operation Bluebird mengatakan mereka tidak ingin sekadar menyalin layanan lama.

Di situs resminya, perusahaan menyebut platform tersebut dibangun sebagai ruang publik digital yang mengutamakan kepercayaan. Mereka menawarkan prinsip "Freedom of speech, protected. Freedom of reach, earned."

Artinya, pengguna tetap diberi ruang untuk berbicara, tetapi jangkauan sebuah unggahan tidak otomatis diberikan berdasarkan popularitas atau algoritma.

Nama, logo burung, istilah seperti "tweet", serta konsep Twitter sebagai ruang publik digital masih memiliki nilai historis dan komersial. Operation Bluebird kini mencoba mengubah nostalgia tersebut menjadi sebuah platform baru. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Gaya Putri Leonor Bisa Ditiru untuk Ngantor

Tampil profesional ke kantor tidak selalu harus identik dengan setelan formal berwarna netral. Putri Leonor dari Spanyol menunjukkan bahwa busana kerja juga bisa terlihat modern, feminin, dan tetap nyaman tanpa kehilangan kesan rapi.

Putri Mahkota Spanyol itu kerap memilih potongan busana yang sederhana, tetapi kuat secara visual. Mulai dari kombinasi denim dan putih, setelan linen berwarna cerah, hingga blazer magenta, gaya Leonor dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan office look yang tidak monoton.

Atasan Denim dan Celana Putih

Saat menghadiri acara di Monastery of Nuestra Señora de Cogollada, Leonor tampil dengan gaya kasual yang tetap terlihat profesional.

Ia mengenakan sleeveless top denim dari Zara dengan celana panjang putih berpotongan lurus. Perpaduan biru dan putih membuat tampilannya terlihat bersih dan simpel.

Leonor melengkapinya dengan sneakers putih dan kalung silver berbentuk hati. Kombinasi ini cocok untuk lingkungan kerja yang memiliki aturan berpakaian lebih fleksibel.

Setelan Linen Oranye

Leonor juga berani menggunakan warna terang untuk agenda resmi. Saat menghadiri acara penerimaan bersama pejabat dan Dewan Pembina Princess of Girona Foundation, ia mengenakan setelan linen berwarna oranye dari Woman Limited yang dijual di El Corte Inglés.

Blazer dan celana tersebut dipadukan dengan tas kulit oranye dari Thinking MU serta sandal emas dari Sézane. Warna oranye menjadi pusat perhatian, sementara potongan setelan tetap menjaga kesan formal.

Gaya ini bisa diterapkan dengan memilih satu warna kuat sebagai fokus, lalu mempertahankan aksesoris tetap sederhana.

Setelan Putih yang Klasik

Pada Princess of Girona Awards 2026, Leonor tampil dalam setelan putih dari Bleis Madrid. Blazer tanpa kerah dan celana panjang putih tersebut memiliki detail payet halus yang memberikan efek berkilau tanpa terlihat berlebihan. Ia memadukannya dengan pump heels off-white dari Lodi Shoes.

Penampilannya dilengkapi tas tangan silver rancangan Elsa Peretti. Hasil akhirnya terlihat klasik, elegan, sekaligus modern. Setelan serba putih seperti ini dapat menjadi pilihan untuk acara kantor yang membutuhkan tampilan lebih formal.

Kemeja Coral

Untuk audiensi bersama Board of Trustees of the Spanish Committee of the United World Colleges Foundation, Leonor memilih kemeja coral dari Carolina Herrera. Atasan fitted tersebut memiliki detail pita di bagian pinggang yang memberikan siluet feminin. Ia kemudian mengenakan wedges espadrille dan cincin emas minimalis.

Pilihan warna cerah membuat busananya terlihat menonjol. Namun, karena bawahannya dibuat sederhana, keseluruhan penampilan tetap terlihat elegan. Triknya bisa diterapkan dengan memilih satu atasan berwarna terang, kemudian memasangkannya dengan bawahan berwarna netral.

Blazer Magenta

Leonor kembali bereksperimen dengan warna ketika menghadiri sejumlah agenda setelah Princess of Girona Awards.

Ia mengenakan blazer linen magenta dari Mirto, kemudian memadukannya dengan atasan dan celana putih. Wedges espadrille, tas magenta dari Heimat Atlantica, serta anting emas menjadi pelengkap.

Kombinasi magenta dan putih membuat penampilannya terlihat segar tanpa kehilangan kesan rapi. Gaya ini juga relatif mudah ditiru. Blazer berwarna cerah dapat menjadi statement piece, sementara pakaian putih digunakan sebagai penyeimbang. Dari kelima penampilan tersebut, terlihat satu pola, Leonor tidak selalu mengandalkan pakaian formal

klasik untuk tampil profesional. Ia bermain dengan potongan sederhana, warna, dan aksesoris secukupnya. Ketika menggunakan warna terang seperti oranye, coral, atau magenta, ia cenderung mempertahankan elemen lainnya tetap sederhana. Sementara untuk tampilan formal, pilihan warna putih dan potongan tailored

memberikan kesan elegan tanpa terlihat berlebihan. (farist/dya)



Menanti MBG Aman, ...dari Hal 1

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan keamanan pangan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, dugaan keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa (1/9/2026) menyebabkan ratusan pelajar dan santri harus mendapat penanganan medis. Hingga Rabu (2/9/2026), jumlah korban mencapai 566 orang. Sebanyak 88 orang masih menjalani perawatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina pada Rabu (2/9/2026) menyebut jumlah tersebut berasal dari 531 korban yang sebelumnya terdata ditambah 35 kasus baru. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mencatat 512 orang terdampak dalam investigasi awal. Dari angka tersebut, 312 orang telah pulih, 80 masih dirawat dan 120 lainnya dalam pemantauan.

Korban tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin. Keluhan juga dilaporkan dari sejumlah lembaga pendidikan lain yang menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah. Dapur tersebut memasok sekitar 2.800 porsi makanan per hari untuk 19 lembaga pendidikan, termasuk sekitar 1.000 porsi untuk Manbaul Hikam.

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Rabu (2/9/2026) mengatakan adanya kesamaan sumber makanan dari lembaga-lembaga yang terdampak.

"Kesamaannya adalah mereka menerima makanan dari SPPG yang sama, yaitu SPPG Kali Tengah, Tanggulangin," kata Emil, Rabu (2/9/2026).

Emil sebelumnya meninjau korban di RSUD Notopuro pada Selasa

(1/9/2026) malam hingga Rabu (2/9/2026) dini hari. Ia mengapresiasi penanganan medis terhadap para korban dan memastikan tidak ada korban meninggal dunia.

Namun, kasus ini menyisakan pertanyaan karena SPPG Kalitengah disebut bukan dapur yang bermasalah secara administratif. Emil mengatakan pada Rabu (2/9/2026) bahwa dapur tersebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sarana dan prasarana dinilai memadai, sementara sejumlah tenaga pengolah makanan telah mengikuti sertifikasi penjamah makanan dan dapur itu juga telah memiliki sertifikasi halal.

"Sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarannya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh," ujar Emil, Rabu (2/9/2026).

Menurut Emil, kepemilikan SLHS tidak serta-merta menutup kemungkinan terjadinya masalah dalam proses penyediaan makanan. Pemeriksaan tetap harus melihat bahan baku hingga pelaksanaan distribusi.

"SLHS ini menilai sistem dan sarpras. Tetapi tetap saja dengan sarpras dan sistem, masih ada ruang kalau misalnya katakana lah bahan makanannya dari awalnya, atau timing pelaksanaan menyimpang dari SOP yang diverifikasi, itu bisa saja menyebabkan masalah," kata Emil.

Kepala SPPG Kalitengah Rafli Ridho pada Rabu (2/9/2026) telah menyampaikan permintaan maaf. "Mohon maaf ya, saya menyesal," ujarnya.

Ia mengatakan makanan telah melalui pengecekan sebelum didistribusikan, tetapi belum mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan. Pemeriksaan laboratorium masih dilakukan untuk mencari penyebabnya.

BGN resmi menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana pada Rabu (2/9/2026) menyatakan dapur tersebut disuspensi selama 30 hari. BGN juga mengusulkan kepala SPPG dicopot dan diganti.

Langkah tersebut masih berada dalam ranah administratif. Sementara penyebab dugaan keracunan belum final karena investigasi dan pemeriksaan laboratorium masih berjalan.

Persoalan tata kelola juga muncul dari keterangan pemerintah daerah. Bupati Sidoarjo Subandi pada Rabu

(2/9/2026) mengungkapkan terdapat 170 SPPG yang beroperasi di wilayahnya. Sebanyak 31 di antaranya disebut belum mengantongi izin. Temuan tersebut telah disampaikan kepada BGN untuk ditindaklanjuti.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini pada Rabu (2/9/2026) meminta BGN melakukan investigasi secara menyeluruh dan terbuka. Ia meminta penyebab kasus ditelusuri sampai ke akar persoalan serta korban mendapat penanganan optimal.

"Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN," kata Yahya, Rabu (2/9/2026).

Polisi menyelidiki dugaan keracunan massal setelah ratusan santri dan siswa di Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan Polresta Sidoarjo telah melakukan penanganan dan pendalaman, termasuk pemeriksaan oleh Tim Laboratorium Forensik Polri. "Tim Laboratorium Forensik Polri juga telah melakukan pemeriksaan," kata Jules, Rabu (2/9/2026). Polisi masih menganalisis hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjutinya apabila ditemukan indikasi kelalaian yang berujung pada pelanggaran hukum.

Makanan yang dikonsumsi korban berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, dan dibagikan pada Selasa (1/9/2026). Menu tersebut terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel. Menu yang sama dikonsumsi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan sejumlah siswa sekolah lain yang menerima pasokan dari SPPG tersebut.

Awalnya, 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keluhan hingga Rabu (2/9/2026) pukul 00.30 WIB. Jumlah tersebut kemudian bertambah 135 orang dari sejumlah sekolah dan lokasi perawatan. Gejala yang muncul antara lain pusing, mual, muntah, dan diare. Para santri sendiri menyantap MBG sekitar pukul 12.00 WIB dan mulai mengalami gejala sekitar pukul 18.00 WIB.

49 Siswa SMA di Nganjuk

Saat Sidoarjo masih menjadi perhatian, dugaan keracunan MBG juga muncul di Nganjuk, Jawa Timur, pada Rabu (2/9/2026). Sebanyak 49 siswa SMAN 3 Nganjuk dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu MBG. Mereka mendapat penanganan di dua rumah sakit.

Menu yang disantap para siswa adalah nasi goreng. Wakil Bupati

REKAM KASUS DUGAAN KERACUNAN MBG 2026

Lanjutan di hal 1...

Jombang, Jawa Timur

- Tanggal: 5 Maret 2026
- Korban: 28 santri
- Penyebab: Nitrit ditemukan pada telur asin.
- Sanksi: SPPG dievaluasi.

Kudus, Jawa Tengah

- Tanggal: 29 Januari 2026
- Korban: 131 siswa
- Penyebab: Bakteri E. coli ditemukan dalam makanan.
- Sanksi: SPPG dievaluasi dan dilakukan penanganan lebih lanjut.

Grobogan, Jawa Tengah

- Tanggal: Januari 2026
- Korban: 803 orang
- Penyebab: Belum diketahui; sampel makanan diperiksa.
- Sanksi: Investigasi dan evaluasi SPPG.

Mojokerto, Jawa Timur

- Tanggal: 9 Januari 2026
- Korban: 411 orang
- Penyebab: Telur rebus dalam soto ayam diduga sudah basi.
- Sanksi: SPPG ditutup sementara dan dievaluasi; BGN mengancam penutupan permanen.



Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro mengatakan keluhan kesehatan tidak langsung muncul setelah makanan dikonsumsi. Para siswa baru merasakan mual sekitar dua jam kemudian.

"Untuk menunya nasi goreng. Tadi mereka bercerita awalnya tidak merasakan apa-apa saat makan. Setelah jeda dua jam baru merasakan mual," kata Trihandy pada Rabu (2/9/2026).

Trihandy juga menegaskan jumlah korban masih dalam proses pendataan. Karena itu, angka 49 perlu dipahami sebagai data yang terinventarisasi dalam perkembangan penanganan pada Rabu sore, bukan angka final penyebab maupun korban akibat keracunan yang telah terkonfirmasi secara laboratorium.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah penerima MBG yang mengalami keluhan kesehatan di Kecamatan Palupuah juga meningkat. Hingga Rabu (2/9/2026), tercatat 334 orang terdampak, naik dari pendataan awal sebanyak 237 orang. (guh,ist,rls,kum/dya)



Kepala SPPG Kalitengah,
Rafli Ridho

KABUT ASAP MEMBURUK, NEGARA-NEGARA TETANGGA PROTES KARHUTLA INDONESIA

Kabut asap yang menyelimuti daerah tersebut merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kabupaten Banyuasin. (ist.antara)

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali berubah menjadi persoalan regional. Asap dari Kalimantan dilaporkan telah menembus Malaysia, Brunei Darussalam hingga Filipina. Di negara-negara tersebut, kualitas udara memburuk, aktivitas warga terganggu, dan sejumlah sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka. Persoalan ini bahkan mulai dibawa ke tingkat ASEAN. Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat menggunakan mekanisme regional untuk menangani polusi asap lintas batas.

Renca itu mencuat dalam Konsultasi Pemimpin Tahunan Malaysia-Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan, Sabtu (22/8). Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kedua negara sepakat bahwa mekanisme ASEAN merupakan pilihan terbaik untuk menghadapi persoalan yang berulang tersebut.

"Kami berdua sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami telah meminta [Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan] untuk menangani masalah ini," kata Anwar dikutip Rabu (2/9/2026).

Malaysia sebelumnya menyatakan akan mengirim surat resmi kepada Sekretariat ASEAN melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kabut asap yang semula dipandang sebagai persoalan domestik Indonesia kembali memiliki dimensi diplomatik dan lingkungan lintas batas.

Di Sarawak, Malaysia, kualitas udara dalam beberapa hari terakhir berada pada kategori tidak sehat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bahkan sempat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di Kuching, Samarahan, Serian, Sri

Aman, dan Betong pada 20-21 Agustus. Muhammad Fazli Bendaud, warga Sarawak, mengatakan asap semakin tebal dan mengganggu kehidupan masyarakat. "Penduduk yang berada di Sarawak terganggu dengan asap yang semakin hari semakin menebal," ujarnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (1/9). "Kasih kita tengok anak-anak yang sekolahnya terpaksa ditutup."

Ia berharap persoalan tersebut tidak sekadar diselesaikan untuk meredakan krisis sesaat. "Jadi kami harap ada solusi dari semua pihak supaya dapat diselesaikan dengan baik permasalahan ini. Mungkin bukan untuk masa sekarang, masa akan datang, supaya tidak terus terjadi, terjadi, dan terjadi lagi."

Dampak lebih jauh dilaporkan dari Filipina. Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau (DENR-EMB) mendeteksi kabut asap di sejumlah wilayah Metro Manila, Calabarzon, dan Mimaropa. Di Kota Quezon, kualitas udara di sejumlah distrik masuk kategori "sangat tidak sehat".

Pemerintah setempat menyarankan warga menggunakan masker berfiltrasi tinggi seperti N95 dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Sejumlah sekolah negeri di Metro Manila bahkan menangguhkan

pembelajaran tatap muka pada Selasa (1/9).

Estela Lata, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, mengatakan dua putrinya harus mengikuti kelas secara daring setelah pembelajaran tatap muka ditangguhkan. Ia dan anak-anaknya bahkan mengenakan masker di dalam rumah. "Saya khawatir putri-putri saya akan menderita batuk dan flu akibat kabut asap, itulah sebabnya saya meminta mereka mulai memakai masker. Saya harap ini [kabut asap] akan segera berakhir," tuturnya kepada BBC.

Di Kota Malabon, Metro Manila, Victoria Lagao, seorang profesor, mengaku didiagnosis sinusitis sejak Sabtu (29/8). Ia menduga gangguan kesehatannya berkaitan dengan kabut

asap. "Awalnya saya pikir sinusitis ini disebabkan perubahan cuaca, tapi setelah pengumuman pemerintah Kota Quezon, saya tahu kalau penyakit saya dipicu oleh kabut asap," katanya. Ia kemudian meminta para siswanya memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Kabut asap lintas batas sebenarnya bukan perkara baru. ASEAN telah mengadopsi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada 10 Juni 2002 dan perjanjian itu berlaku sejak 2003. Indonesia kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.

Perjanjian tersebut mengharuskan negara-negara anggota mencegah dan memantau polusi asap lintas batas, memperkuat pengendalian kebakaran, mengendalikan pembakaran terbuka, mencegah pembukaan lahan dengan api, serta membangun sistem pemantauan dan pertukaran informasi. Negara yang menjadi sumber asap juga diwajibkan merespons permintaan informasi atau konsultasi dari negara yang terdampak.

Namun, perjanjian ASEAN itu tidak mengenal denda otomatis, sanksi ekonomi, hukuman terhadap negara, ataupun mekanisme kompensasi otomatis. Sengketa diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.

Indonesia sendiri telah mengakui bahwa asap karhutla telah mencapai negara tetangga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 23 Agustus mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri. "Kalau secara informal ada, secara formal juga melalui Pak Menlu [Sugiono] tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya menangani Karhutla," ujarnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli juga mengakui asap telah menjangkau Manila. "Ya kami akan berjuang sekuat tenaga," katanya sekuat tenaga dengan Komisi IV DPR, Selasa (1/9).

"Kita akan berjuang sekuat tenaga



Artis Sherina Munaf terjun langsung padamkan api di karhutla Kalimantan. (Instagram @bosfoundation)